

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme Koordinasi antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Majalengka melibatkan pengaturan tugas, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Tahapan dalam mekanisme koordinasi antara lain; pembentukan rapat koordinasi, perencanaan program, pemantauan dan evaluasi, penyelesaian masalah bersama serta penyusunan laporan dan pelaporan.
2. Faktor yang menghambat efektivitas hubungan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Majalengka, yaitu: rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan akses informasi, masalah administrasi, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan sumber anggaran.
3. Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Majalengka yaitu dengan berperan sebagai fasilitator, koordinator dan katalisator untuk memperkuat kemampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majalengka dalam menangani masalah kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas kelembagaan memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap efektivitas dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berfungsi sebagai penghubung dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem berjalan secara sinergis dan bekerja sama dalam

memantau serta mengevaluasi efektivitas program yang telah dilaksanakan.

## **B. Saran**

1. Mekanisme Koordinasi antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Majalengka sudah bagus. Dengan adanya rapat koordinasi dengan sistem triwulan, hal itu dapat memudahkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai perangkat daerah pelaksana program penanggulangan kemiskinan. Koordinasi yang baik antar lembaga harus dipertahankan agar tidak menimbulkan *misskomunikasi*.
2. Faktor yang menghambat efektivitas hubungan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Majalengka harus segera dievaluasi dan diperbaiki. Para lembaga terkait harus menemukan cara/inovasi baru supaya program penangglangan kemiskinan dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
3. Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai koordinator utama harus ditingkatkan lagi. Setiap anggota harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Ini termasuk peran dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) harus dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sektor swasta, maupun komunitas lokal. Dengan membangun jaringan yang baik, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dapat mengakses sumber daya dan informasi yang lebih banyak.